



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 1 TAHUN : 1989 SERI : D NO : 1

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Pelita IV telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang cukup mantap, oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 1989 - 1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah, mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap

akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun pertama sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila ;

- c. bahwa sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor BANGDA 1/9/26 tanggal 26 Nopember 1978 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah jis Nomor 050.1/65 BANGDA tanggal 24 Maret 1987 dan Nomor 050.1/1153/BANGDA tanggal 23 Mei 1988 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan

- an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Pasal 1

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Bab III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bab IV : Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan selanjutnya setiap tahun disusun APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA,

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttt.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Januari 1989, Nomor : 050.33 — 078.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1, tanggal 19 Pebruari 1989,
Seri : D No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.

ttt

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk
Wilayah Semarang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 1988

Tentang

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah di segala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Di samping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor BANGDA 1/9/26 tanggal 26 Nopember 1978 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah jis Nomor 050.1/65 BANGDA tanggal 24 Maret 1987 dan Nomor 050.1/1153/BANGDA tanggal 23 Mei 1988 perihal Pedoman

**Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V
Daerah**

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

NASKAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan arah dan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan di segala bidang dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan pernyataan kehendak dan aspirasi seluruh rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
3. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi Daerah Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman baik bagi masyarakat Jawa Tengah maupun bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Memberikan arah dan garis-garis kebijaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila untuk menciptakan masyarakat dan wilayah Jawa Tengah yang berketahanan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, dengan tujuan agar dapat mewujudkan keadaan

yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang.

C. POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ;
2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima (Pelita V) Daerah.

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui perjuangan seluruh rakyat, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni suatu masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pernah menampilkan sejarah yang gemilang dalam perjuangan mencapai kemerdekaan terus berjuang dengan bekerja keras untuk membangun guna mengisi kemerdekaan tersebut, yakni menciptakan masyarakat yang tata tentrem karta raharja.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga lahirnya Orde Baru, Jawa Tengah selain pernah mengalami masa perjuangan fisik yang berat yang meminta banyak pengorbanan materiil dan spiritual, pernah pula merasakan akibat-akibat gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan dan pemberontakan sampai dengan yang terakhir pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965. Berbagai peristiwa tersebut menimbulkan gangguan terhadap stabilitas Daerah, sehingga usaha-usaha untuk memerangi dan mengatasi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan tidak dapat ditangani dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang yang menambah beban penderitaan rakyat lahir batin.
3. Sejalan dengan keberhasilan perjuangan yang sungguh-sungguh dari Orde Baru dalam menciptakan stabilitas Nasional, maka di Jawa Tengah tercipta pula keadaan yang mantap untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha pembangunan Daerah di berbagai bidang secara terus-menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana dengan tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Usaha pembangunan Daerah harus benar-benar merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan segala hasil pembangunan yang telah dicapai, dengan penekanan pada pengembangan kualitas

sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selalu mengembangkan sikap realistik yang ber-pengharapan dan prinsip-prinsip sehat mental, sehat pengelolaan, berdayaguna dan berhasilguna serta disiplin yang kuat.

5. Penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya didasarkan atas Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara menuju kepada terwujudnya masyarakat dan wilayah yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang juga mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi-potensi, baik potensi alamiah maupun sosial, serta ber-aspirasi pada pengertian yang tersirat dalam Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang mengandung aspek-aspek :
 - a. Aspek filosofis dalam kehidupan rakyat, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, keagungan, keabadian dan kemuliaan ;
 - b. Aspek perilaku keteladanan yang terdiri dari sikap-sikap kesatria-an dan kepahlawanan, kejujuran dan kesucian, keluhuran, keteguhan serta persatuan antara Pemerintah dan Rakyat ;
 - c. Aspek-aspek fisik sebagai perwujudan (refleksi) dari aspek ideal dan perilaku, yaitu yang banyak diwujudkan dalam kebudayaan dan kesenian yang khas Jawa Tengah ;
 - d. Aspek potensi kekayaan alam yang terkandung di wilayah Jawa Tengah ;
 - e. Aspek ruang dan kedudukan Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi Laut Jawa dan Samudera Hindia serta terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Timur.
6. Agar pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembanguan Nasional dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah kepada pencapaian tujuan, perlu disusun Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahap I yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pelita Daerah/Modernisasi Desa tahap Pertama, Pelita Daerah/Modernisasi Desa tahap Kedua, yang selanjutnya disusul dengan Pelita Daerah yang Ketiga, Keempat dan

Kelima, sehingga merupakan rangkaian Pelita Daerah yang sambung menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

7. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang sebagai bagian dari usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan Bangsa pada umumnya dan pembangunan Daerah Jawa Tengah pada khususnya disusun berdasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan struktural UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979, serta landasan operasional GBHN/TAP. MPR. Nomor II/MPR/1988 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan V, dengan memperhatikan ciri-ciri utama Daerah, masalah-masalah khusus, prioritas dan potensi Daerah.
8. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan garis-garis besar rencana pembangunan Daerah yang memberikan kejelasan tujuan, arah dan kebijaksanaan pembangunan Daerah yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pedoman, arahan dan bimbingan dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan keterpaduan pembangunan lima tahunan yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sesuai dengan modal dasar dan faktor-faktor dominan sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kondisi dan potensi wilayah Jawa Tengah yang dapat didayagunakan untuk pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

K o n d i s i

1. Kedudukan geografi Jawa Tengah yang terletak di antara $108^{\circ} 30'$ - $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 40'$ - $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan , serta pada posisi strategis antara Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, antara Laut Jawa dan Samudera Hindia dengan tata ruang wilayah yang efektif yang telah dicapai selama ini, merupakan kondisi yang sangat menguntungkan dan membuka kesempatan untuk pembangunan wilayah dalam satu kesatuan sistem Perwilayahan Pembangunan Nasional.
Jawa Tengah beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kema-

rau silih berganti sepanjang tahun. Temperatur udara rata-rata 25, 2°C dengan kelembaban rata-rata 83,4 %.

2. Penduduk Jawa Tengah menurut hasil pencatatan tahun 1986 berjumlah 27.360.665 jiwa, terdiri dari 13.403.845 jiwa (43,99%) laki-laki dan 13.956.820 jiwa (51,01%) perempuan. Penduduk usia kerja (10 tahun keatas) berjumlah 19.827.449 jiwa (72,47%) dan penduduk usia produktif berjumlah 15.680.096 jiwa (57,31%). Angka rata-rata kepadatan penduduk sebesar 841 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kotamadya Surakarta yaitu 11.460 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Blora yaitu 410 jiwa/km². Dilihat dari penyebarannya pada Desa dan Kota, maka kurang lebih 82% penduduk tinggal di Pedesaan, sedangkan yang 18% ada di daerah Perkotaan.
3. Keadaan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat Jawa Tengah dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah, selain pencapaian swasembada pangan sejak tahun 1984, juga tercermin dalam besarnya Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1986 sebesar Rp. 8.560,02 milyar atau Rp. 314.779,- per kapita, menurut harga konstan tahun 1983. Apabila dinyatakan menurut harga yang berlaku, maka Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebesar Rp. 10.575,57 milyar atau Rp. 388.897,- per kapita. Dalam pada itu, sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama Pelita Keempat dapat mencapai rata-rata 6% setiap tahun.
4. Keadaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah yang merupakan salah satu unsur dari Ketahanan Nasional serta kekuatan sosial politik dan ABRI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat, sangat mendukung dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
5. Keadaan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah berdasarkan catatan pada tahun 1988 semakin meningkat, dengan tingkat kematian kasar sebesar 6°/oo penduduk, tingkat kematian bayi 52,2°/oo kelahiran hidup, tingkat kematian balita 8,29°/oo anak balita, umur harapan hidup rata-rata 61,4 tahun, angka kesakitan diare 846.166 dan TBC 1.344.
6. Keadaan upaya kesehatan di Jawa Tengah pada tahun 1988 dengan angka pencakupan imunisasi 65% dari jumlah anak di bawah umur

19 bulan, penyediaan air bersih di daerah perkotaan 37,5% jumlah penduduk dan pedesaan 80% jumlah penduduk. Pelayanan BKIA tahun 1987 mencakup 55,7% ibu hamil, 89,5% ibu menyusui dan 71,7% anak balita. Sedangkan anak-anak yang menderita derajat gizi kurang pada tahun 1981 tercatat sebesar 0,91%.

7. Kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat, kemauan dan kemampuan masyarakat Jawa Tengah selama ini cukup tinggi.
8. Karya-karya budaya masyarakat Jawa Tengah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang berisi ajaran-ajaran yang bersifat rokhaniah telah berkembang dari masa ke masa.
9. Dalam rangka mencerdaskan bangsa, usaha-usaha peningkatan pendidikan terus-menerus dilakukan, baik untuk pendidikan formal maupun non-formal.

Pada Pelita IV telah berhasil ditingkatkan usaha pemerataan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dasar, sehingga hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Jawa Tengah dapat tertampung di Sekolah-sekolah Dasar.

Sementara itu pada bidang pendidikan non-formal, pada akhir Pelita IV Jawa Tengah telah berhasil menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar). Di samping itu usaha peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan telah dilaksanakan, namun hasilnya belum optimal, sehingga perlu dilanjutkan pada tahap pembangunan berikutnya.

P o t e n s i

1. Sumber daya alam mencakup potensi biotik dan non-biotik. Potensi biotik meliputi aneka ragam flora baik berupa tumbuhan liar maupun tanaman yang dibudidayakan seperti hutan lindung, hutan produksi, tanaman pertanian, tanaman pekarangan dan sebagainya, serta berbagai jenis fauna berupa binatang besar dan binatang kecil, baik yang ditenakkan maupun yang masih liar. Dari segi fisiografi, keadaan topografi Jawa Tengah berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam serta daerah pantai.

Di Jawa Tengah yang luas wilayahnya 32.533 km² terdapat deretan gunung berapi yang masih aktif yang berpengaruh terhadap tingkat

kesuburan tanah. Berbagai jenis tanah di Jawa Tengah memungkinkan untuk budidaya pertanian, sehingga lebih dari 77% luas tanah digunakan sebagai lahan pertanian antara lain berupa sawah, tegal, tambak, kolam, hutan dan perkebunan.

Sumber-sumber air yang berupa air laut dan air di daratan yang meliputi sungai-sungai, waduk-waduk besar dan air dalam tanah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, tenaga listrik dan sebagainya.

2. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar, yaitu 15.680.096 jiwa atau 57,31% dari jumlah penduduk, apabila memiliki kualitas dan dapat dibina dengan sebaik-baiknya akan merupakan modal utama yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
3. Karya-karya budaya masyarakat Jawa Tengah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang berisi ajaran-ajaran yang bersifat rohaniyah, yang telah berkembang dari masa ke masa, di samping merupakan daya penggerak dalam memberikan corak dan memperkaya kebudayaan Nasional, juga cukup besar sumbangannya pada pembangunan peradaban Bangsa.
4. Kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat, kemauan dan kemampuan rakyat untuk terus melaksanakan pembangunan serta sifat-sifat kekeluargaan dan gotong royong merupakan modal yang tak ternilai harganya dalam pembangunan di Daerah.
5. Derajat kesehatan yang semakin meningkat merupakan sumbangan yang besar bagi upaya pengembangan sumber daya manusia, yang bersama-sama dengan hasil pembangunan sektor lainnya secara terpadu dapat memantapkan tingkat Ketahanan Wilayah, dan lebih lanjut merupakan sumbangan terhadap kemandirian Ketahanan Nasional.
6. Upaya kesehatan dengan pelayanan yang semakin meningkat, mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan dan peranserta masyarakat yang semakin baik, sehingga merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan sehat untuk semua di tahun 2000.
7. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah dicapai selama ini merupakan modal pembangunan yang perlu dimanfaatkan secara optimal pada tahap pembangunan berikutnya.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan Nasional di Daerah, maka tujuan pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah terciptanya wilayah dan masyarakat yang berketahanan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah tersebut akan dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Memecahkan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah, untuk lebih cepat mencapai tujuan pembangunan.
2. Menunjang, menerapkan dan melengkapi pelaksanaan pembangunan Nasional di Daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah Jawa Tengah, landasan dan asas-asas pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menjadi landasan serta asas-asas pembangunan Daerah.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Sejalan dengan arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang, maka arah Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

U M U M

1. Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayah.
2. Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya akan tercapai apabila dijiwai dengan hakekat ketaqwaan dan budi luhur ma-

nesia yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, dan keselarasan cita-cita hidup di dunia dan akhirat.

3. Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dilandasi oleh Strategi Wawasan Identitas perlu dijabarkan secara lengkap, terpadu, kompak dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan wilayah Jawa Tengah yang berketahanan menuju terwujudnya Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan.
4. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Titik berat pembangunan diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama tercapainya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sejalan dengan keberhasilan di bidang ekonomi akan terbuka kesempatan yang lebih luas bagi pembangunan di bidang-bidang lainnya, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jangka Panjang diarahkan sebagai bagian nyata dari usaha nasional dalam menciptakan Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah dan pembagian hasilnya tidak boleh menimbulkan kegoncangan-kegoncangan sosial politik dan ekonomi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Stabilitas Nasional harus memperlancar pembangunan Daerah dan pembangunan Daerah harus memperkuat Stabilitas Nasional di Daerah.
6. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jangka Panjang diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas Daerah serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang merata. Hal ini berarti bahwa pembangunan Daerah harus dapat mencegah dan mengurangi melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana, wajar dan tenggang rasa serta rasa kesetiakawanan sosial dalam rangka mencapai keadaan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

KEBIJAKSANAAN BIDANG - BIDANG PEMBANGUNAN

1. Bidang Ekonomi

- a. Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang diarahkan untuk dapat menciptakan perubahan dalam struktur ekonomi daerah, di mana sektor di luar pertanian secara bertahap harus mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini harus tercermin dalam nilai sumbangannya terhadap produksi daerah dan jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya di luar sektor pertanian.
- b. Pembangunan Daerah Jangka Panjang menetapkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata.
Bersamaan dengan itu dilakukan upaya-upaya pengembangan kualitas manusia agar dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, di samping untuk meningkatkan produksi daerah, maka bersamaan dengan itu harus dapat mempercepat pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja. Berkaitan dengan itu perlu peningkatan mutu tenaga kerja yang membawa implikasi terhadap sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Di samping itu perlu pula pengaturan penawaran tenaga kerja sehingga terdapat keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja di satu pihak dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di lain pihak.
- d. Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam harus direncanakan sebaik-baiknya dengan tetap mengingat kebutuhan generasi yang akan datang.
Dengan demikian pembangunan Daerah harus berwawasan lingkungan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan merugikan generasi yang akan datang.
- e. Pembangunan Daerah memerlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan penerahan

dana tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana-dana dari luar.

- f. Pembangunan Ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen sehingga membawa manfaat bagi daerah serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.
- g. Pembangunan Ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim sehat bagi partisipasi masyarakat termasuk golongan ekonomi lemah (usaha kecil, tradisional dan informal), antara lain dengan meningkatkan pola usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kemandiriannya. Dalam pembangunan dengan Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud, tidak tersedia tempat bagi sistem free fight liberalism, etatisme maupun pemusatan dan monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya

- a. Dalam rangka Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus juga terkandung peningkatan keimanan, ketaqwaan dan penalaran manusia serta perubahan sikap mental yang dapat mendorong pembangunan daerah.
Berbagai upaya untuk membentuk dan mengarahkan mentalitas manusia yang mengandung serangkaian nilai-nilai budaya sangat diperlukan untuk membudayakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan Pancasila, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai harus serasi dengan perubahan orientasi sosial masyarakat ke arah terwujudnya suatu mentalitas yang menunjang pembangunan daerah. Usaha-usaha peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia ke arah pengembangan masyarakat berbudaya dan berkualitas perlu lebih di-

galakkan dalam menghadapi dampak dari pembangunan daerah itu sendiri.

- b. Dalam usaha tersebut kesadaran dan kesediaan golongan/masyarakat yang lebih maju untuk membantu mereka yang kurang mampu perlu terus ditingkatkan. Di lain pihak sifat-sifat ketergantungan harus makin dikurangi menuju keadaan masyarakat yang lebih mandiri.

3. Bidang Politik

Dalam bidang politik, dimantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap Warga Negara, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum yang semakin mantap. Kondisi ini akan dapat menjamin kelancaran usaha pencapaian tujuan Nasional.

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Sesuai Doktrin Pertahanan Nasional, salah satu syarat mutlak untuk mensukseskan perjuangan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kondisi yang memungkinkan negara dan rakyat hidup aman dan tenteram bebas dari berbagai gangguan dan ancaman. Terciptanya kondisi tersebut memungkinkan Negara dan Rakyat dapat menyelenggarakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, karena dalam kondisi itu terdapat keselarasan antara kebutuhan jasmani dan rokhani, terdapat ketenteraman dan ketertiban lahir batin serta bebas dari rasa ketakutan dan tekanan.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH (SPATIAL)

Kebijaksanaan tata ruang daerah lebih diarahkan guna mencapai optimasi pemanfaatan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kegiatan di daerah yang ada dan diperkirakan akan berkembang.

Kebijaksanaan tata ruang daerah juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan. Di samping itu juga diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam sistem perwilayahan pembangunan untuk lebih mewujudkan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diperlukan pengamatan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor geografis, sosiologis, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup.

Kebijaksanaan Jangka Panjang diarahkan pada :

- 1. Kebijakan pembangunan Desa-kota berdasarkan pada tingkat hubungan yang serasi antara desa dan kota sehingga merupakan satu kesatuan pengembangan yang perlu diwujudkan dalam pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat.**
- 2. Kebijakan pembangunan pada Wilayah Pembangunan (WP) berdasarkan kepada sistem pengembangan kegiatan pelayanan yang bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah-daerah, dan juga mengarah pada peningkatan pemerataan kemudahan serta untuk lebih menyaserasikan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan.**

Kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Jawa Tengah akan tetap meneruskan perwilayahan pembangunan yang lalu, yaitu :

- a. Wilayah Pembangunan I, meliputi wilayah sekitar Semarang dengan pusat pengembangannya di kota Semarang ;**
 - b. Wilayah Pembangunan II, meliputi wilayah pantai Utara sebelah Barat dengan pusat pengembangannya di kota Pekalongan ;**
 - c. Wilayah Pembangunan III, meliputi wilayah pantai Utara sebelah Timur dengan pusat pengembangannya di kota Kudus ;**
 - d. Wilayah Pembangunan IV, meliputi wilayah sekitar Surakarta dengan pusat pengembangannya di kota Surakarta ;**
 - e. Wilayah Pembangunan V, meliputi wilayah pantai Selatan sebelah Barat dengan pusat pengembangannya di kota Cilacap.**
- 3. Kebijakan pembangunan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan atas sistem keterpaduan kegiatan antar sektor yang mengarah kepada peningkatan, perlindungan, rehabilitasi, pemeliharaan,**

pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai yang meliputi :

- a. DAS Pemali-Comal.
- b. DAS Jratunseluna.
- c. DAS Bengawan Solo.
- d. DAS Progo-Opak.
- e. DAS Serayu-Luk Ulo (Kedu Selatan-Serayu).
- f. DAS Citanduy-Cisanggarung.

E. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini merupakan landasan bagi penyusunan pola umum pembangunan Daerah jangka menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah yang merupakan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

BAB III

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Kaitan antara Pelita Kelima Daerah dengan Pelita-Pelita sebelumnya

Pelaksanaan Pelita Pertama dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian, Pelita Kedua dengan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, Pelita Ketiga dengan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan Pelita Keempat dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Pelita-Pelita selanjutnya, telah mencapai hasil yang positif, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, yaitu :

- a. meningkatnya taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Tengah yang semakin merata ;
- b. terpecahkannya masalah-masalah yang pokok dan mendesak secara bertahap dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada, serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Hasil-hasil tersebut dapat dicapai, antara lain karena telah adanya dasar-dasar dan pokok kebijaksanaan yang tepat yaitu :

- a. Pada Pelita Pertama dan Kedua Daerah : telah ditetapkan arahan umum pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu Modernisasi Desa ;
- b. Pada Pelita Ketiga Daerah : telah ditetapkan tujuan pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu terwujudnya Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan, yang pada dasarnya ialah wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berketahanan ;
- c. Pada Pelita Keempat Daerah : telah ditetapkan strategi pembangunan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan Daerah tersebut

yaitu strategi pembangunan daerah yang berwawasan jati diri (Strategi Wawasan Identitas) yang pada dasarnya adalah mewujudkan Jawa Tengah yang berketahanan dengan cara menjabarkan seluruh kebijaksanaan Nasional di Daerah dengan memperhitungkan wawasan wilayah baik mengenai potensi yang ada, aparaturnya yang tersedia dan tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Dengan hasil-hasil tersebut terciptalah kerangka landasan yang memungkinkan masyarakat Jawa Tengah untuk melanjutkan pembangunan, terus tumbuh dan berkembang dalam Pelita Kelima Daerah sebagai pelaksanaan tahap kelima dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Pola Umum Pelita Kelima Daerah yang meliputi jangka waktu 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994 adalah rencana pembangunan yang disusun berlandaskan pada dan merupakan kesinambungan dari Pelitada-Pelitada sebelumnya, sehingga selain merupakan kelanjutan juga sekaligus peningkatan, perluasan dan pembaharuan segala hasil pembangunan yang telah dicapai di semua sektor pembangunan.

Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Dalam Pelita Kelima Daerah diusahakan terciptanya landasan yang mantap bagi masyarakat Jawa Tengah untuk benar-benar dapat tinggal landas pada Pelita Keenam dan memacu pembangunan menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Strategi Wawasan Identitas. Selanjutnya dalam Pelita Kelima Daerah akan diusahakan peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan dan pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan dengan tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan dengan penekanan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

2. Masalah-masalah Pokok

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya da-

pat diselesaikan dalam Pelitada-Pelitada yang lalu adalah :

a. Kependudukan

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan penyebaran yang tidak merata ;
- 2) Masih rendahnya kualitas penduduk terutama tenaga kerja ;
- 3) Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia ;
- 4) Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan belum meratanya pembagian pendapatan.

b. Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam

- 1) Terganggunya keseimbangan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian sumber alam dan merosotnya kualitas lingkungan ;
- 2) Belum mantapnya pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang terbatas.

c. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah ;
- 2) Mutu dan kesesuaian pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan pembangunan Daerah serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana ;
- 3) Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal dan pengembangan sistem informasi yang belum memadai.

d. Laju Pertumbuhan Antar Daerah

- 1) Perbedaan laju pertumbuhan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia serta perbedaan peluang dan kemungkinan pengembangan ;

e. Aparatur Pemerintah

- 1) Kemampuan Aparatur Pemerintah yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan ;
- 2) Masalah pemantapan dan pengembangan organisasi, peningkatan tugas dan fungsi, pembinaan dan penyediaan personil dan tata laksana kerja yang belum memadai ;
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah.

Pada hakekatnya pembangunan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan, penunjang serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua Sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi :

- a. **Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan Daerah sebagai pengamalan Pancasila ;
- b. **Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi ;
- c. **Pengamalan Sila Persatuan Indonesia**, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa ketiakawanan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. **Pengamalan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, yang antara lain mencakup makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara Stabilitas Nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung ja-

wab politik warga negara serta bergairahnya rakyat dalam proses politik ;

- e. **Pengamalan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Oleh karena itu pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam Pelita Kelima Daerah harus dilaksanakan searah, sejalan dan serasi dengan pembangunan Nasional, yaitu makin meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja serta memecahkan masalah-masalah yang belum sepenuhnya dapat ditangani dalam Pelitada-Pelitada yang lalu.

Sejalan dengan hal itu dalam Pelita Kelima Daerah akan dimantapkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perekayasaan sosial. Dalam pada itu orientasi pembangunan akan lebih diarahkan pada pembangunan pedesaan.

B. TUJUAN.

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang maka tujuan Pelita Kelima Daerah adalah sesuai dengan Tujuan Pelita Nasional, yaitu :

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam, dan penataan ruang yang serasi ;
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya dengan lebih menekankan pada :
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap dengan tergalangnya kekuatan dan ketahanan ekonomi serta meningkatnya produktivitas total wilayah dan investasi yang lebih produktif, pemu-

- pukan modal masyarakat, dunia usaha swasta dan koperasi;
- b. Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dimana Pemerintah lebih berfungsi membina dan mengayomi guna memberikan kesempatan kepada Dunia Usaha Nasional agar lebih berperanan melalui penciptaan iklim usaha dan iklim investasi;
 - c. Peningkatan kualitas manusia yang meliputi ketaqwaan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan masyarakat dan kemampuan alih teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas karya, ke-swadayaan dan kemandirian serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;
 - d. Pengembangan budaya politik Pancasila dengan memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang tercermin dalam keseluruhan semangat dan gerak pembangunan yang dilakukan oleh seluruh kekuatan sosial politik;
 - e. Peningkatan kemampuan menangkal bentuk-bentuk gangguan dan ancaman serta peningkatan kemandirian kewaspadaan Nasional di Daerah, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan dimaksud akan dilanjutkan usaha-usaha pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang belum terselesaikan dalam Pelita Keempat Daerah dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi sumberdaya baik alam maupun manusia dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Sesuai Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka dalam Pelita Kelima Daerah prioritas pembangunan Daerah diletakkan pada pembangunan bidang Ekonomi yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan.
2. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka pembangunan bidang-bidang di luar bidang ekonomi makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan kualitas manusia seba-

gai sumber daya insani dalam makna yang seluas-luasnya, termasuk meningkatkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Dalam melakukan pembangunan bidang ekonomi dan bidang-bidang di luar bidang ekonomi tersebut perlu lebih memperhatikan daerah-daerah khusus yang relatif terkebelakang, terisolir dan minus dengan sasaran serasinya pertumbuhan antar daerah.

D. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pelita Kelima Daerah ialah :

U M U M.

1. Melanjutkan dan meningkatkan arah dan kebijaksanaan Pembangunan Daerah selama Pelita Keempat Daerah sehingga terjalin kesinambungan program pembangunan Daerah Jawa Tengah dan semakin nyata dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat yang mencerminkan meningkatnya kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat memperkokoh Ketahanan Nasional di Daerah, dengan berlandaskan pada Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.
2. Memantapkan stabilitas politik di Daerah, dengan meningkatkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, serta mengusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Nasional di Daerah, melalui peningkatan kehidupan rakyat secara konstitusional, demokratik dan berdasarkan hukum yang selalu ditingkatkan dan dibina terus menerus.

Sejalan dengan itu demi tegak-tumbuhnya kehidupan konstitusional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka kekuatan sosial politik khususnya Parpol dan Golkar, yang telah berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas harus semakin mampu, mandiri dan mantap dalam membangkitkan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam usaha mengayomi masyarakat supaya hidup tenteram lahir batin dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas dan usaha-usaha ini akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu maka Aparatur Pemerintah di Daerah pada umumnya dan Aparatur Penegak Hukum khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan sikap mental, kewibawaan, kejujuran dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban.
4. Memelihara dan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjamin Stabilitas Nasional dan kelancaran pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah. Untuk itu kesiapan, kewaspadaan dan ketrampilan aparat keamanan terus ditingkatkan di samping usaha-usaha pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban.
5. Memantapkan stabilitas ekonomi dengan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik sehingga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari cukup tersebar dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap dalam Pelita Kelima Daerah harus dapat dicapai kenaikan produksi barang dan jasa di berbagai sektor yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan lain-lain sehingga memberi sumbangan baik dari segi nilai tambah maupun penciptaan lapangan kerja. Hal itu perlu diusahakan dengan meningkatkan penerahan dan pendayagunaan sumber daya dan dana, pengembangan kelembagaan termasuk di dalamnya peningkatan konsolidasi tata niaga, pendayagunaan teknologi tepat guna, serta perluasan kesempatan berusaha.
6. Pelaksanaan Pelita Kelima Daerah memerlukan pembiayaan yang memadai baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat dengan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan yang ada untuk lebih mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta mendorong kegiatan investasi bagi sektor swasta. Penggunaan dana pembangunan dan investasi harus diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas serta lebih ditingkatkan dayaguna dan hasilnya.

7. Pengembangan sumber daya manusia perlu diselenggarakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di berbagai bidang yang mencakup terutama kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan serta penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian dapat ditingkatkan kualitas manusia Indonesia serta pendayagunaan jumlah penduduk yang besar sebagai salah satu modal dasar Pembangunan Nasional. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diselaraskan dengan persyaratan keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pembangunan.

8. Penciptaan lapangan kerja perlu ditingkatkan dan dimantapkan melalui langkah-langkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu, baik langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, regional maupun khusus.

Langkah-langkah yang bersifat umum meliputi kebijaksanaan dalam produksi, investasi, perdagangan, harga, upah dan lain-lain serta berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang bersifat sektoral antara lain meliputi kebijaksanaan pembangunan di sektor-sektor pertanian, industri, jasa dan lain-lain yang berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja.

Langkah-langkah yang bersifat regional meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di tiap-tiap daerah.

Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan pemberian bantuan pembangunan, kegiatan padat karya dan lain-lain.

9. Kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan terciptanya angkatan kerja yang mampu dan siap bekerja sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja dalam pembangunan di daerah. Dalam rangka pemerataan lapangan kerja

perlu ditingkatkan berbagai langkah yang meliputi antara lain pen-dayagunaan angkatan kerja, pembinaan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

10. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di-arahkan untuk memajukan kecerdasan, ketrampilan dan kesejahte-raan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup-nya serta untuk memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pema-ngunan.
11. Dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah perlu ditingkat-kan usaha-usaha untuk menyerasikan laju pertumbuhan antar dae-rah dan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.
Koordinasi fungsional perwilayahan perlu untuk ditingkatkan dalam rangka pemantapan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang berbatasan.
12. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Daerah dalam Pelita Kelima Daerah perlu dipelihara dan dikembangkan partisipasi masyarakat serta peningkatan peranan lembaga swadaya masyara-kat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terpadu di dalam sistem pengembangan dan pen-dayagunaan Aparatur Pemerintah dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Daerah.
13. Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu ditingkat-kan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok masyarakat dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani ber-lahan sempit, nelayan, pengrajin dan lain-lainnya. Kebijakan-sanaan yang memberi kesempatan lebih banyak kepada golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal perlu dilanjut-kan dan ditingkatkan dengan memberikan kepastian usaha, mem-perkuat permodalan, bimbingan teknologi, peningkatan ketrampilan dan kemampuan berusaha serta memperluas pemasaran.
14. Pen-dayagunaan dan pemanfaatan tanah perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Untuk itu perlu dikembangkan perencanaan tata ruang dan tata guna tanah, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara ber-

bagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan sehingga dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.

15. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah yang perlu diatasi karena dapat merupakan beban bagi pembangunan dan mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sekaligus mendayagunakan jumlah penduduk yang besar bagi peningkatan pembangunan di segala bidang, langkah-langkah di bidang kependudukan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu.

16. Dengan makin meningkat dan kompleksnya pembangunan perlu makin ditingkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, termasuk pengawasan melekat yang dilandasi oleh disiplin serta rasa tanggung jawab dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga benar-benar dapat dicapai efisiensi dalam pembangunan.

KEBIJAKSANAAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI.

1. Pertanian.

Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh.

Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan mutu dan produksi pertanian, melestarikan produksi dan sumber hayati pertanian, serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komoditi ekspor, komoditi bahan baku industri dalam negeri, hasil hutan dan ikutannya, meningkatkan taraf hidup petani/nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peranserta swasta dalam upaya mengem-

bangkan potensi pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha optimasi pendayagunaan lahan dengan pengusahaan berbagai macam tanaman/komoditi pangan, perkebunan dan kehutanan, berbagai usaha peternakan dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, meningkatkan kemampuan pengusahaan dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat pada usaha-usaha pertanian serta pendayagunaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Samudra Hindia serta upaya pendayagunaan potensi dan sumber daya laut dan wilayah pantai yang perlu dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata sesuai kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

2. Pengairan.

Pembangunan pengairan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup bagi peningkatan produksi pertanian, pengamanan wilayah produksi dari kerusakan akibat banjir, sekaligus memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, industri serta kelistrikan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilestarikan sumber-sumber air, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dan sarana pengairan, perbaikan dan pengaturan sungai.

Demikian pula akan tetap dilanjutkan pengembangan air tanah khususnya di daerah-daerah yang kering dan rawan.

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi yang ada akan dikembangkan dan ditingkatkan peran serta kelompok tani pemakai air Dharma Tirta sejak tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharannya. Demikian pula akan selalu ditingkatkan penyuluhan, penyampaian informasi, pendidikan dan latihan baik kepada petugas maupun petani di bidang pengairan.

3. Industri.

Pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, dengan penekanan pada pengembangan industri yang sejauh mungkin diarahkan untuk pendalaman dan pematapan struktur industri. Berkembangnya

industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan devisa, diupayakan pula melalui pengembangan keterkaitan antara pembangunan sektor industri dengan sektor lain, antara industri besar, menengah dan kecil serta antaraindustri hulu dan hilir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Pertambangan.

Pembangunan pertambangan diarahkan khususnya kepada peningkatan usaha-usaha penelitian, pemetaan, identifikasi, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang dan galian yang potensial, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta pengembangan perangkat lunak dan keras yang diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan dan partisipasi swasta nasional serta memperluas lapangan kerja.

5. Energi.

Pembangunan energi terutama tenaga listrik baik dalam pembangkitan transmisi maupun distribusinya serta diversifikasi dan sumber energi lainnya diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi (industri dan pertanian) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dengan pengelolaan secara hemat dan efisien.

6. Perhubungan.

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang, jasa dan informasi serta meningkatkan mobilitas manusia ke seluruh daerah, sehingga tercapai tingkat kemudahan yang merata dan akan memperlancar roda perekonomian serta menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan.

7. Pariwisata.

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup masyarakat dan mendorong pembangunan daerah dengan lebih meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha termasuk koperasi untuk memperluas kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha terutama masyarakat setempat, serta tetap terpeliharanya kepribadian dan kebudayaan daerah, memupuk rasa cinta tanah air serta melestarikan alam dan lingkungan hidup.

8. Perdagangan.

Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran, memperlancar arus barang dan jasa dalam lingkup lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam pada itu perlu ditingkatkan pembinaan komoditas dan daya saing komoditas khususnya komoditas andalan Jawa Tengah melalui peningkatan efisiensi produksi, pemasaran, peningkatan mutu, lingkungan, sarana, dan prasarana perdagangan, serta usaha pembinaan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal.

9. Koperasi.

Pembangunan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus semakin dikembangkan dan diperkuat khususnya dalam bidang organisasi dan manajemen dalam rangka menumbuhkan Demokrasi Ekonomi sebagai salah satu landasan bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial. Di samping itu juga diarahkan untuk mengembangkan peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial, dengan lebih meningkatkan kemampuan koperasi khususnya pada tingkat primer agar berperan lebih besar di berbagai sektor produksi/jasa, seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan dan pariwisata, serta meningkatkan kemampuan dan peranan koperasi fungsional, meliputi koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, koperasi pemuda dan koperasi mahasiswa agar tumbuh semakin kuat dan mandiri.

10. Dunia Usaha Nasional.

Pembangunan dunia usaha Nasional di Daerah diarahkan untuk menunjang dan melengkapi usaha pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan dunia usaha Nasional di daerah, dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan, serta perluasan kesempatan berusaha dan

peningkatan ekspor non-migas dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang tersedia, melalui usaha penciptaan iklim usaha yang sehat dan mendorong serta merangsang pertumbuhan dunia usaha Nasional baik usaha swasta, usaha negara maupun koperasi. Golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya, perlu ditingkatkan pola usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kemandiriannya.

11. Tenaga Kerja.

Pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan harkat martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

12. Transmigrasi.

Pembangunan transmigrasi sebagai upaya pendayagunaan tenaga kerja dan penyebaran penduduk secara lebih merata diarahkan untuk memperbaiki mutu kehidupan, meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

Pemerataan pembangunan di daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan antara daerah yang lebih maju, kurang maju dan daerah minus.

Pembangunan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sangat mendesak antara lain : perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pedesaan dan perkotaan serta meningkatkan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber alam serta melalui pendekatan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan kegiatan antar daerah, keseimbangan daerah pede-

saan dan perkotaan serta pengaturan Daerah Aliran Sungai. Dalam hubungan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pengembangan wilayah pedesaan maupun perkotaan. Khusus wilayah pedesaan diarahkan untuk peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan serta kualitas hidup terutama bagi golongan penduduk pedesaan yang miskin, potensial dan produktif dengan peningkatan potensi kota kecamatan dan desa-desa pusat pertumbuhan guna mendorong pertumbuhan desa-desa sekitarnya.

Pengembangan sumber daya laut dan wilayah pantai diarahkan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk di wilayah pantai yang perlu dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata sesuai kondisi dan potensi sumber daya laut dan wilayah pantai yang ada dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk melestarikan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam suatu keseimbangan yang dinamis agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat baik masa kini maupun bagi generasi mendatang. Di samping itu dikembangkan pula kesadaran lingkungan dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup serta akan tetap diupayakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu dengan jalan mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam program-program pembangunan.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila menuju terbentuknya manusia-manusia pembangunan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap negara, bangsa dan tanah air yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, serta keserasian antara pembangunan fisik material dan mental spiritual.

Untuk itu, kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan terus dikembangkan, dengan menciptakan iklim yang memungkinkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama umat beragama, diantara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan diantara semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal dan keikutsertaannya dalam pembangunan di daerah.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- a. agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- b. untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Pendidikan.

- a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu perwujudan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan har-

kat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

c. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk :

- 1). Meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah tingkat pertama, dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas.
- 2). Melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan, khususnya nilai-nilai 1945, kepada generasi muda di semua jenis dan jenjang pendidikan formal, non-formal maupun di masyarakat.
- 3). Memperluas kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang cacat, atau bertempat tinggal di daerah terpencil. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya.
- 4). Meningkatkan dan memperluas pendidikan luar sekolah/non-formal yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, seperti kepramukaan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.
- 5). Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah.
- 6). Meningkatkan dan mendayagunakan prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan pendidikan masyarakat/non-formal.
- 7). Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olah raga untuk

meningkatkan kesehatan jasmani dan rokhani seluruh masyarakat dalam rangka pemupukan watak, meningkatkan disiplin dan sportivitas serta pengembangan prestasi olah raga dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

- 8). Meningkatkan mutu, kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

3. Kebudayaan.

- a. Kebudayaan Daerah Jawa Tengah, yang merupakan perwujudan cipta, rasa dan karsa masyarakat, sebagai salah satu identitas daerah yang merupakan bagian dan sekaligus sebagai penunjang kebudayaan nasional adalah modal dasar dalam pembangunan daerah.
- b. Pembangunan kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalan, pemeliharaan, pemupukan, pengembangan dan penyelamatan kebudayaan daerah dan diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan segala kehidupan baik bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik, guna :
 - 1). Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal dan memantapkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.
 - 2). Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur, menyerap nilai-nilai dari luar yang positif bagi pembangunan daerah dan menangkal nilai-nilai budaya dari luar yang negatif.
 - 3). Menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan seperti sikap mandiri dalam kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja keras, jujur dan kesatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta

penuh pengabdian.

- 4). Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara baik dan benar.
- 5). Membina, melestarikan dan mengembangkan bahasa Daerah (bahasa Jawa) dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan Nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa. Bahasa Daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa.
- 6). Mengembangkan kesenian daerah sebagai ungkapan budaya sehingga mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati seni-budaya daerah serta membangkitkan semangat dan gairah membangun.
- 7). Meningkatkan pemeliharaan dan pembinaan tradisi dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan daerah dan bangsa.
- 8). Meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi, maupun sosial budaya dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk lebih menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan di daerah dan membantu memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi.

Untuk itu perlu peningkatan kemampuan lembaga dan koordinasi antar lembaga, pengembangan jaringan informasi ilmiah termasuk

kestatistikan dan penggunaan jasa komputer, komunikasi hasil-hasil penelitian, alih teknologi serta peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, untuk dapat menunjang perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

5. Kesehatan.

a. Pembangunan kesehatan sebagai upaya mempertinggi kualitas hidup manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan termasuk gizi masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan dengan mendorong makin meningkatnya peranserta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

b. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di pedesaan maupun di perkotaan, dengan meningkatkan, memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan dengan selalu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan di samping dikembangkan cara pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sendiri.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan terutama melalui upaya peningkatan dan pencegahan yang dilakukan secara serasi dan seimbang dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta pencegahan penyakit di samping upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, dengan memperluas penyuluhan kesehatan serta didukung dengan upaya pengendalian, pengawasan obat, makanan dan bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, kemampuan manajemen dengan sistem informasi yang mantap serta upaya pengembangan dan pembinaan hukum di bidang kesehatan.

c. Peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih luas, terpadu dan merata sekaligus memelihara dan mengembangkan warisan budaya mengenai cara pengobatan tradisional, dengan penggalian, penelitian, pengujian dan pengembangan mutu obat-obatan, di samping perlu terus didorong langkah-langkah pengembangan budaya tanaman obat-obatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggung-jawabkan.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kebijaksanaan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk dalam rangka peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ibu dan anak agar dapat terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

7. Perumahan dan Pemukiman.

Pembangunan perumahan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu dengan harga yang dapat terjangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sesuai dengan tata ruang dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu perlu diciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan pemukiman di daerah perkotaan dan pemugaran perumahan dan lingkungan di pedesaan.

Di samping itu perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

8. Kesejahteraan Sosial.

a. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial diarahkan untuk menciptakan suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lahir batin serta memiliki harga diri dan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.

b. Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan agar tercipta sistem nilai dan sikap sosial yang mendukung usaha-usaha pembangunan sehingga terwujud kualitas hidup, partisipasi sosial, disiplin sosial dan lingkungan hidup sosial yang menunjang pembangunan sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat. Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial diutamakan fungsi pencegahan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial, di samping fungsi rehabilitasi dan fungsi penunjang.

- c. Peningkatan usaha-usaha pelayanan sosial dilanjutkan untuk memberi kesempatan yang lebih luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab serta kemampuan setiap penduduk untuk ikut serta dalam pembangunan, memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan menggalakkan potensi perse-orangan maupun organisasi sosial.

9. Generasi Muda.

- a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda, sebagai sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional serta sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.
- b. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan sedini mungkin mulai tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda.
- c. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan pemuda dan pemerintah.
- d. Pembinaan dan pengembangan generasi muda ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya utama dalam pembangunan.
- e. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diusahakan antara lain melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa, bernegara, mempertebal idealisme, patriotisme dan harga diri, memperluas wawasan ke masa depan, memperkuat kepribadian dan berdisiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk kesegaran jasmani dan daya kreasi, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, ketrampilan, semangat kerja

- keras dan kepeloporan serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional.
- f. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk membentuk pemuda yang mampu menjadi kader yang tangguh serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh dan dapat membantu usaha mengatasi berbagai tantangan dan masalah pembangunan, seperti masalah tenaga kerja dan pendidikan.
- g. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan rasa tanggungjawab mereka terhadap pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional serta masa depan bangsa.
- h. Pendidikan politik dalam rangka lebih memantapkan perwujudan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin ditingkatkan guna mempertebal kesadaran pemuda sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.
- i. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan sehingga akan meningkatkan kegiatan kepemudaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

10. Peranan Wanita.

Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, oleh karena itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan untuk meningkatkan peranserta dan sumbangannya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita. Peranan wanita dalam pembangunan dikembangkan selaras dan serasi dengan perkembangan tanggungjawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pengembangan gene-

rasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam rangka mendorong peranserta wanita dalam pembangunan, perlu makin ditingkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Politik.

Dalam usaha untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dan untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis di daerah, maka pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, sehingga perlu makin diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu lebih didorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa.

2. Aparatur Pemerintah.

Dalam usaha untuk meningkatkan pengabdian dan kesetiaan Aparatur Pemerintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat.

3. Hukum.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketenteraman dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin pene-

gakan hukum, pelayanan dan kepastian hukum.

Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggungjawab sosial pada setiap anggota masyarakat, serta lembaga-lembaga hukum yang ada.

Di samping itu, hukum harus benar-benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas di daerah.

4. Penerangan dan Media Massa.

Pembangunan penerangan dan media massa harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila. Sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah, penerangan diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memantapkan nilai-nilai budaya bangsa untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan kepada usaha untuk mengembangkan sistim keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dalam rangka mendukung kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-

hasilnya serta peningkatan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai bencana yang timbul. Dalam usaha pembelaan negara perlu ditumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam rangka mendukung perwujudan daya tangkal yang tangguh terhadap berbagai gangguan dan ancaman.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH (SPATIAL)

Dalam rangka penjabaran arah kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam arah pembangunan jangka panjang serta untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dipahami dan dipcahkan serta segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan lingkungan, diperlukan arah kebijaksanaan tata ruang daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa dan Kota.

Pendekatan tata ruang pedesaan dan perkotaan ini memadukan dinamika pembangunan yang tumbuh di daerah pedesaan di satu pihak dengan pengaruh pertumbuhan perkotaan di lain pihak.

Dalam rangka mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota dan meningkatkan peran pedesaan perlu dikembangkan desa-desa sebagai pusat dinamika pembangunan.

2. Wilayah Pembangunan.

Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keeratan hubungan antar kegiatan yang ada, yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya alam dan manusia dan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Jawa Tengah didasarkan atas hasil pengamatan pembangunan yang lalu. Kebijakan yang ditempuh ialah dengan menentukan 5 (lima) Wilayah Pembangunan. Perwilayahan ini berdasarkan potensi wilayah dan kedudukannya pada struktur ekonomi wilayah yang nyata berkembang sekarang dan diperhitungkan akan memberi dorongan untuk mempercepat pertumbuhan mass mendatang.

Berdasarkan pengamatan dari hasil perkembangan sampai sekarang, maka wilayah-wilayah yang akan dapat mempercepat pertumbuhan

tersebut ialah :

- a. **Wilayah Pembangunan I**, meliputi daerah Semarang dan sekitarnya dengan pusat pengembangannya kota Semarang. Potensi utama wilayah ini antara lain industri, perdagangan, pariwisata khususnya perhotelan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu potensi lainnya yang dapat dikembangkan antara lain pendidikan, pemerintahan dan berbagai kegiatan jasa.
- b. **Wilayah Pembangunan II**, meliputi daerah pantai Utara sebelah Barat dengan pusat pengembangannya kota Pekalongan. Potensi utama yang dapat dikembangkan adalah industri logam dan batik. Selain itu dapat dikembangkan pula pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan di daerah bagian Selatan.
- c. **Wilayah Pembangunan III**, meliputi daerah pantai Utara sebelah Timur dengan pusat pengembangannya kota Kudus. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri terutama industri rokok, industri logam, perkebunan dan pariwisata.
- d. **Wilayah Pembangunan IV**, meliputi daerah sekitar Surakarta dengan pusat pengembangannya kota Surakarta. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri batik, pengecoran logam, perkebunan dan pariwisata.
- e. **Wilayah Pembangunan V**, meliputi daerah pantai Selatan sebelah Barat dengan pusat pengembangannya kota Cilacap. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri besar, perkebunan, pertanian pangan dan pariwisata.

Selain kelima wilayah pembangunan tersebut dimungkinkan pula tumbuhnya pusat-pusat lain yang potensial, demi keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan dalam pada itu diperlukan pula untuk merintis perencanaan Sub Regional yang meliputi beberapa Daerah Tingkat II demi keterpaduan dan efisiensi pembangunan.

3. Daerah Aliran Sungai.

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan secara optimal serta mempertahankan fungsi-fungsi sumber alam berupa hutan, tanah dan air, sekaligus merehabilitasi yang rusak serta meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain, sekaligus merehabilitasi yang rusak, maka di Jawa Tengah ditentu-

kan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut :

- a. DAS Pemali - Comal.
- b. DAS Jratunseluna.
- c. DAS Bengawan Solo.
- d. DAS Progo - Opak.
- e. DAS Serayu - Luk Ulo (Kedu Selatan - Serayu).
- f. DAS Citanduy - Cisanggarung.

Kebijaksanaan tata ruang sebagai tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan pertumbuhan dan pemerataan tingkat pelayanan dengan mengusahakan penggunaan tanah secara lestari, optimal dan seimbang, serta mengusahakan keserasian antara wilayah Pembangunan Jawa Tengah dengan Wilayah Pembangunan di Propinsi tetangga, sehingga dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menunjang, menerapkan dan melengkapi Pembangunan Nasional dan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi serta masalah-masalah yang dihadapi, maka sasaran-sasaran pembangunan masing-masing sektor dalam Repelita Kelima Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

EKONOMI

1. Pertanian.

- a. Meningkatkan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- b. Kelestarian produksi dan sumber hayati pertanian.
- c. Berkembangnya usaha tani terpadu.

2. Pengairan.

- a. Meningkatkan mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana pengairan.
- b. Meningkatkan peranserta dan prakarsa kelompok tani pemakai air (Dharma Tirta).

3. Industri.

- a. Meningkatnya mutu, produksi dan pemasaran hasil produksi industri.
- b. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada bidang industri.
- c. Meningkatnya pendapatan pengusaha dan pengrajin.
- d. Keseimbangan lingkungan hidup.

4. Pertambangan.

- a. Meningkatnya investasi, identifikasi dan penelitian berbagai sumber bahan tambang dan galian.
- b. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi berbagai bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- c. Meningkatnya investasi dan partisipasi dunia usaha nasional.
- d. Meningkatnya dayaguna air bawah tanah untuk berbagai keperluan.
- e. Keseimbangan lingkungan hidup.

5. Energi.

- a. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana pembangkit tenaga listrik.
- b. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi.
- c. Meningkatnya usaha diversifikasi energi dengan pengembangan potensi energi lain yang tersedia setempat dan hemat biaya.

6. Perhubungan.

- a. Meningkatnya mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana perhubungan.
- b. Meningkatnya kemampuan organisasi dalam kegiatan pelayanan jasa perhubungan.

7. Pariwisata.

- a. Meningkatnya mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-

sektor lain.

- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan.
- c. Pendayagunaan aset wisata yang potensial.

8. Perdagangan.

- a. Meningkatnya efisiensi pemasaran, penyediaan dan pemerataan sarana prasarana perdagangan serta perluasan kesempatan kerja.
- b. Penganeka –ragaman pengembangan komoditas andalan Jawa Tengah dan upaya daya saing terhadap komoditi luar negeri serta meningkatnya semangat penggunaan produksi dalam negeri.

9. Koperasi.

- a. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perkoperasian, serta pengembangan kerjasama antara koperasi dengan usaha niaga swasta.
- b. Meningkatnya bimbingan dan pembinaan bidang usaha dan kelembagaan koperasi di berbagai sektor produktif.

10. Dunia Usaha Nasional.

- a. Meningkatnya iklim usaha yang merangsang tumbuh berkembangnya dunia usaha nasional baik swasta, negara maupun koperasi.
- b. Meningkatnya kerjasama antar dunia usaha nasional baik swasta, negara maupun koperasi dan antar dunia usaha nasional dengan pemerintah.
- c. Meningkatnya penanaman modal oleh masyarakat terutama penanaman modal dalam negeri.
- d. Meningkatnya kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewirawastaan para pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal.

11. Tenaga Kerja.

- a. Meningkatnya pola perencanaan ketenagakerjaan di daerah secara terpadu dan menyeluruh di dalam rangka menciptakan kesempatan

- an kerja seluas-luasnya di berbagai lapangan kerja.
- b. Kesempurnaan sistem informasi pasar kerja, sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di dalam rangka penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, terutama bagi angkatan kerja usia muda dengan mekanisme yang tepat.
 - c. Meningkatnya pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara pekerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menciptakan kesamaan pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing, meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan serikat pekerja, serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
 - d. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mengembangkan kewiraswastaan dan penyediaan tenaga trampil.
 - e. Meningkatnya kegiatan padat karya baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan yang mempunyai tenaga pengangguran dan setengah pengangguran.

12. Transmigrasi.

- a. Meningkatnya kemantapan penyelenggaraan transmigrasi.
- b. Meningkatnya jumlah dan mutu transmigran yang akan dibrangkatkan ke daerah transmigrasi.
- c. Meningkatnya penerangan dan penyuluhan transmigrasi dalam rangka menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi, dengan lebih mendorong transmigrasi swakarsa.
- d. Meningkatnya keterampilan para calon transmigran sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di daerah transmigrasi.

13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

- a. Meningkatnya usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pendekatan perwilayahan sebagai model pembangunan agar supaya ketimpangan/perbedaan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi dan pembangunan secara seimbang dapat segera terwujud.
- b. Meningkatnya fungsi kota, keserasian hubungan antar kota, efi-

siensi dan efektifitas kemampuan Aparat Pemerintah Kota, serta optimasi penggunaan lahan kota.

- c. Meningkatnya usaha pemanfaatan tanah sesuai dengan kemampuan daya dukungnya meliputi penataan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta pemanfaatan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan, termasuk dalam hal ini meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan, dengan sasaran meningkatnya pendapatan golongan penduduk yang miskin, potensial dan produktif, menuju desa swasembada.

14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Meningkatnya kegiatan pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pengelolaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta melestarikan sumber alam dan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Agama.

- 1). Meningkatnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- 2). Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
- 3). Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama.
- 4). Meningkatnya pendidikan agama di sekolah umum mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai dengan perguruan

tinggi.

- 5). Makin meningkatnya senibudaya yang bernafaskan keagamaan.
- 6). Meningkatnya prasarana dan sarana bimbingan, penyuluhan dan penerangan agama.
- 7). Meningkatnya usaha-usaha pelayanan dan kelancaran penuaian ibadah bagi umat beragama.

b. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 1). Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2). Meningkatnya kerukunan intern dan antar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3). Tercapainya pembinaan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

2. Pendidikan.

- a. Meningkatnya mutu pendidikan formal maupun pendidikan masyarakat/non-formal.
- b. Meningkatnya daya tampung pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah pertama.
- c. Meningkatnya pendidikan Pancasila termasuk pendidikan/penyebarluasan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat memupuk, mengembangkan dan meneruskan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan, khususnya nilai-nilai 1945.
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan masyarakat/non formal terutama penuntasan Bebas Tiga Buta (buta aksara latin, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar), kepramukaan serta berbagai ketrampilan, kejuruan, keahlian, kemahiran praktis untuk dapat memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja.

- e. Meningkatnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya di bidang pendidikan formal, maupun pendidikan masyarakat/non-formal.
- f. Meningkatnya partisipasi dan pengabdian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan di daerah pedesaan.
- g. Tercapainya kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, menyandang cacat atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
- h. Tercapainya pembinaan kepada anak-anak berbakat istimewa untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya.
- i. Meningkatnya pembinaan dan pengajaran bahasa Jawa sebagai salah satu pelajaran wajib (muatan lokal); sekaligus menunjang pengembangan bahasa Indonesia.
- j. Meningkatnya dan makin didayagunakannya prasarana dan sarana pendidikan disemua jenjang pendidikan, baik pendidikan formal, maupun masyarakat/non-formal.
- k. Makin sempurnanya sistem pendidikan dan pengembangan berbagai jenis bakat, kemampuan, keahlian dan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
- l. Meningkatnya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam rangka menciptakan dan memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga kerja yang cakap dan trampil di berbagai bidang, terutama bidang-bidang pertanian, industri jasa dan perhubungan.
- m. Meningkatnya pendidikan kedinasan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah yang produktif, kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- n. Meningkatnya mutu, peranan dan tanggungjawab perguruan swasta dengan tetap memperhatikan ciri-ciri khas perguruan tersebut serta syarat-syarat pendidikan secara umum.
- o. Meningkatnya kerjasama untuk lebih memantapkan peranan pengabdian dan tanggungjawab perguruan tinggi dalam menunjang pembangunan daerah.
- p. Meningkatnya pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga menjangkau semua lembaga pen-

didikan dan masyarakat luas di seluruh daerah.

- q. Meningkatnya pembinaan dan pendidikan tenaga kependidikan serta pembinaan kesejahteraannya.
- r. Meningkatnya pendidikan jasmani dan olah raga di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat serta di lingkungan kedinasan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.
- s. Meningkatnya sarana/prasarana di berbagai cabang olah raga dalam rangka meningkatkan prestasi dan prestise Jawa Tengah di tingkat daerah, nasional dan internasional.

3. Kebudayaan.

- a. Meningkatnya pembinaan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara tepat, baik dan benar di lingkungan pendidikan formal, masyarakat/non-formal dan di lingkungan dinas/instansi serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya.
- b. Meningkatnya pengkajian dan pembinaan bahasa daerah (bahasa Jawa) sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan.
- c. Berkembangnya kesenian daerah, tercapainya pelestarian kesenian tradisional serta meningkatnya apresiasi dan kreativitas seni.
- d. Tersedianya serta meningkatnya prasarana dan sarana pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatnya peranserta masyarakat untuk membina dan melestarikan kesenian daerah.
- f. Berkembangnya permuseuman sebagai tempat untuk menampung, memelihara, melestarikan, menikmati, menghargai dan mendayagunakan peninggalan kebudayaan nenek moyang dan sekaligus sebagai tempat rekreasi dan studi tentang kebesaran dan keagungan bangsa di masa lampau.
- g. Meningkatnya pelestarian dan pendayagunaan peninggalan sejarah dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h. Meningkatnya minat, kebiasaan dan kegemaran membaca di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat melalui peningkatan perpustakaan.

- i. Meningkatnya penggalian, inventarisasi dan dokumentasi sejarah dan nilai-nilai tradisional serta kebudayaan daerah.
- j. Meningkatnya usaha-usaha pembauran bangsa di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

- a. Meningkatnya kegiatan penelitian, khususnya penelitian yang dalam waktu singkat dapat membantu memecahkan masalah-masalah pokok, dengan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.
- b. Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga penelitian, organisasi-organisasi profesi serta koordinasi antar lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian di dalam maupun di luar perguruan tinggi agar lebih meningkatkan daya guna, hasil guna dan partisipasinya dalam menunjang pembangunan di daerah.
- c. Meningkatnya pengembangan jaringan data dan informasi ilmiah, kestatistikan, penggunaan jasa komputer dan komunikasi hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, baik yang bersifat sektoral/departemental maupun yang bersifat lintas/multi sektoral.

5. Kesehatan.

- a. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan.
- b. Meningkatnya penyuluhan kesehatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta membudayakan perilaku hidup sehat di seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatnya kesehatan lingkungan ditujukan kepada perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
- d. Meningkatnya status gizi masyarakat untuk mengatasi masalah gizi utama.
- e. Meningkatnya perbaikan kesehatan rakyat yang meliputi pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan,

pemberantasan penyakit menular, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat, makanan dan minuman, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan dan imunisasi untuk kesejahteraan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana.

- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rumah sakit, lembaga-lembaga pemulihan kesehatan, pusat-pusat kesehatan masyarakat serta lembaga kesehatan lainnya termasuk swasta dengan selalu memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaannya.
- g. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan yang profesional.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah kependudukan secara terpadu antar instansi/lembaga yang terkait dengan mengikutsertakan masyarakat.
- b. Meningkatkan penerangan dan pendidikan kependudukan pada setiap tingkat pendidikan dan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintahan yang terendah.
- d. Meningkatkan program Keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan pembinaan peserta keluarga berencana dengan mendorong peranan dan tanggung jawab masyarakat, serta memelihara dan meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana lestari, mantap dan mandiri.

7. Perumahan dan Pemukiman.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah meliputi tersedianya perumahan rakyat, air bersih dan penye-

hatan lingkungan pemukiman.

8. Kesejahteraan Sosial.

- a. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu.
- b. Meningkatnya penyuluhan dan bimbingan sosial untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab sosial serta meningkatnya kemampuan setiap penduduk untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatnya kemampuan, peranan organisasi sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- d. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, lanjut usia yang kurang beruntung, korban bencana alam dan musibah lainnya serta rehabilitasi sosial bagi mereka yang tersesat.
- e. Meningkatnya usaha-usaha untuk membantu para penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.
- f. Meningkatnya pembinaan dan penyantunan cacat veteran dan pejuang kemerdekaan sesuai dengan dharma baktinya kepada bangsa dan negara.
- g. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya kegiatan swadaya sosial masyarakat.
- h. Meningkatnya pembinaan tenaga kesejahteraan sosial.

9. Generasi Muda.

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui berbagai jalur dan wadah pembinaan generasi muda.
- b. Meningkatnya usaha-usaha penanggulangan pengaruh kebudayaan yang negatif terhadap generasi muda.
- c. Meningkatnya partisipasi, rasa memiliki dan rasa ikut bertanggungjawab atas pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

- d. Meningkatnya pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat memberi bekal untuk siap menciptakan dan memenuhi kebutuhan berbagai lapangan kerja.
- e. Meningkatnya wadah-wadah generasi muda, antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), organisasi mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Palang Merah Remaja, secara terarah dan terpadu.
- f. Meningkatnya prasarana dan sarana pembinaan generasi muda antara lain di bidang olah raga, kesenian, kepariwisataan, lingkungan hidup, keagamaan, dan usaha-usaha produktif.

10. Peranan Wanita.

- a. Meningkatnya peranan dan tanggungjawab wanita dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya kegiatan wanita dalam mewujudkan, membina dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun.
- c. Meningkatnya peranserta wanita dalam pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.
- d. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan peranan wanita yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektoral di semua bidang yang berkaitan dengan upaya peningkatan peranan wanita pada semua tingkatan.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Politik

- a. Meningkatnya pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sehingga memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat sehingga rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Meningkatnya peranan organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum yang terdiri dari Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan secara lebih efektif dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1992.
- d. Meningkatnya kegiatan dan peranan kekuatan-kekuatan sosial politik, khususnya Partai-partai Politik dan Golongan Karya dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik, baik dalam melaksanakan pendidikan politik maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan. Disamping itu perlu tercipta iklim yang sehat bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila di dalam masing-masing organisasi sosial politik maupun di lingkungan masyarakat luas.
- e. Meningkatnya kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya, dan bagi kekuatan sosial politik, untuk menampung serta menyalurkannya, sehingga berkembang komunikasi politik timbal balik antar masyarakat serta antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat dan dengan pemerintah.
- f. Meningkatnya peranan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta terciptanya iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana bagi masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
- g. Meningkatnya fungsi dan peranan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat terutama di pedesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan, serta terciptanya iklim dan peluang kepada generasi muda untuk nantinya lebih berperan di masa depan.

2. Aparatur Pemerintah.

- a. Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah di Daerah yang mencakup segi organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan personil serta sarana dan prasarana kerja, termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah selaku aparatur perekonomian daerah; sejalan dengan itu aparatur pemerintah semakin mampu melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan penertiban dan pengawasan termasuk pengawasan melekat serta langkah-langkah penindakannya terhadap aparatur pemerintah, terutama dalam menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang; kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak kewibawaan aparatur pemerintah.
- c. Meningkatkan hubungan fungsional antar legislatif dan eksekutif, koordinasi dan kerjasama aparatur pemerintah baik aparatur Pusat maupun aparatur Daerah serta semakin mantapnya hubungan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II dan antar Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih terencana dan terpadu. Demikian juga kemajuan pembangunan daerah akan semakin mengarah kepada terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab.
- d. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Wilayah Kecamatan agar dapat melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif serta meningkatnya kemampuan Pemerintahan Desa, yang makin mampu melayani masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang makin tertib berdayaguna dan berhasilguna.
- e. Meningkatkan fungsi dan peranan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga mencapai tujuan

pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna.

3. Hukum.

- a. Meningkatnya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, tersusunnya perundang-undangan daerah yang baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan daerah di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, serta semakin mantapnya penanganan administrasi hukum, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan peraturan perundang-undangan daerah, pengawasan preventif, dan represif terhadap perundang-undangan daerah bawahan, dan adanya prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.
- b. Semakin mantapnya kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatnya kemampuan dan kewibawaannya. Disisi lain para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bersih, tegas dan adil.
- c. Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
- d. Meningkatnya pelayanan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang kurang mampu, agar dapat dicapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Sejalan dengan itu dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum maka proses peradilan dilaksanakan lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- e. Meningkatnya pengembangan dan penegakan hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Penerangan dan Media Massa.

- a. Meningkatnya perluasan jangkauan penerangan sampai ke pedesaan dalam rangka pemerataan informasi yang memanfaatkan berbagai media penerangan seperti pers, radio, televisi, film, video, media komunikasi tradisional dan forum komunikasi pedesaan, dengan memperhatikan kondisi dan kebinekaan masyarakat, kepribadian bangsa dan tercegahnya dampak negatif yang mungkin timbul. Demikian pula penyebaran koran masuk desa dan pemberitaan pembangunan untuk desa akan semakin banyak.
- b. Meningkatnya peranan pers dalam pembangunan dalam rangka pengembangan pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab; pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, sehingga akan berkembang interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.
- c. Meningkatnya kemampuan forum komunikasi pedesaan dalam pembangunan, sarana-prasarana dan media massa.
- d. Meningkatnya peranan penerangan dan peranan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dapat lebih mendorong tumbuhnya peranan, peranserta dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan.
- e. Meningkatnya penerangan secara terpadu dan peranan media massa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1992.

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mantapnya sistem ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa yang berintikan alat negara penegak hukum dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sehingga terbina ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang tangguh serta meningkatnya perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai bencana yang timbul.

2. Meningkatnya peranan pertahanan sipil sebagai salah satu unsur pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.
3. Meningkatnya peranan Resimen Mahasiswa sebagai wadah penyalur potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
4. Meningkatnya kemanunggalan ABRI dan rakyat dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai kekuatan sosial politik di daerah.
5. Mengamankan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1988.
6. Meningkatnya kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dan kewaspadaan terhadap subversi, golongan ekstrim dan bentuk-bentuk gangguan terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya serta gangguan kamtibmas lainnya.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

1. Umum.

Pembangunan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan yang bermakna menunjang dan merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan Nasional, harus berjalan serasi dan selaras dengan proses Pembangunan Nasional tersebut. Untuk itu Pembangunan Daerah harus merupakan usaha terciptanya kondisi yang memungkinkan pembangunan Bangsa dapat berjalan lancar.

Keseimbangan pembangunan akan tetap diusahakan baik keseimbangan pembangunan antar daerah maupun antar sektor. Keseimbangan pembangunan tersebut harus mendukung terciptanya struktur ekonomi yang kuat yang mendasarkan pada keseimbangan antara industri dan pertanian.

Di samping itu ikhtiar pembangunan yang kita lakukan sudah barang tentu berpedoman pada Trilogi pembangunan, sehingga pembangunan tersebut benar-benar dapat mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan, dalam suasana perikehidupan bangsa yang stabil dan dinamis.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peranserta dan pengarahan dana dari pemerintah dan masyarakat, baik dalam maupun luar

negeri, guna mendukung pembiayaan pembangunan yang senantiasa meningkat; maka sasaran yang perlu dicapai adalah usaha pemekaran basis pendapatan daerah, baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber dana yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk maksud tersebut maka sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan perbaikan aparatur pemerintah yang menyangkut jumlah, mutu dan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan, baik aparatur otonom maupun aparatur vertikal, guna mewujudkan asas otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggungjawab.

Sehubungan dengan itu maka untuk pembiayaan pembangunan di daerah perlu disediakan dana dalam jumlah yang memadai, yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh kumulatif yang berhasilguna dan berdayaguna secara maksimal dan sekaligus merupakan usaha menciptakan iklim yang memungkinkan investasi-investasi swasta dapat berkembang.

2. Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

a. Anggaran Pemerintah.

1) Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah yang ada ditempuh kebijaksanaan sesuai dengan sifat masing-masing sumber pembiayaan, baik yang sepenuhnya dikuasai Daerah maupun yang berada di luar kekuasaan Daerah.

a) Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah baik melalui program dan proyek sektoral, maupun melalui berbagai jenis program bantuan pembangunan (program-program Inpres) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada di luar penguasaan Daerah.

Dalam hal ini kebijaksanaan peningkatan pembiayaan pem-

bangunan Daerah diarahkan untuk :

- (1) Peningkatan perencanaan program/proyek yang lebih mengarah pada pemecahan masalah pokok Daerah dan sekaligus berakibat menunjang dan melengkapi program pembangunan Nasional di Daerah.**
- (2) Peningkatan peranan Daerah dalam pengendalian pelaksanaan program/proyek sektoral sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara optimal sebagai akibat adanya keterpaduan antara prioritas Daerah dan kepentingan Nasional.**

b) Sumber Pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri

Pada dasarnya sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri merupakan sumber yang sepenuhnya dalam penguasaan Daerah dengan kebijaksanaan yang lebih diarahkan untuk meningkatkan sumbangan dari masing-masing sumber pembiayaan tersebut dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus menerus melalui :

- (1) Kebijakan dalam bidang perpajakan Daerah dan pengendalian sumber-sumber penerimaan Daerah yang diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis pungutan serta perluasan obyek pajak dan retribusi Daerah dengan tetap berpegang teguh pada asas pemerataan, efisiensi dan kelayakan besarnya beban pungutan ;**
- (2) Kebijakan yang menyangkut Perusahaan Daerah dan unit-unit usaha milik Daerah lainnya yang diarahkan pada pemantapan kedudukan dan fungsinya melalui peningkatan usaha-usaha ekonomis dengan memperhatikan tata hubungan yang selaras dan serasi dengan usaha masyarakat ;**
- (3) Kebijakan mengenai tabungan baik tabungan Pemerintah maupun tabungan masyarakat, yang diarahkan pada usaha peningkatan tabungan tersebut untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan pembangunan.**

Penerimaan anggaran dari sumber Daerah sendiri untuk pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan, sehingga

secara bertahap perbandingan kemampuan Anggaran Daerah terhadap anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat akan meningkat.

Demikian pula tetap diusahakan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berimbang dan dinamis. Kebijakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibarengi dengan suatu sistem pengawasan yang berhasilguna terhadap keuangan, harta benda dan semua inventaris milik Pemerintah Daerah. Selain itu juga harus menjamin pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta memperlihatkan dengan jelas adanya keserasian antara tahap pelaksanaan program/proyek dan tahap-tahap realisasi pembiayaan yang dibutuhkan.

2) Luar Negeri.

Dalam usaha memperlancar pelaksanaan pembangunan di Daerah, sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri merupakan sumber pelengkap bagi sumber pembiayaan dalam negeri. Sumber-sumber ini berupa bantuan asing melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman yang syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan untuk pembayaran kembali. Demikian pula bantuan asing kepada Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan langsung (proyek) dari lembaga pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah.

Untuk ini dalam Pelita Kelima Daerah akan dimantapkan usaha-usaha untuk mendayagunakan sumber pembiayaan luar negeri guna meningkatkan kualitas pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas serta peningkatan usaha-usaha rekayasa sosial yang mendorong kemandirian, disesuaikan dengan prioritas dan masalah yang dihadapi di Daerah, serta pembinaan dan pengawasan sebaik-baiknya.

b. Non-Anggaran Pemerintah.

1) Dalam Negeri.

Sumber pembiayaan non-anggaran Pemerintah yang berasal dari dalam negeri berupa :

a) Sumber Pembiayaan yang Berasal dari Dunia Usaha.

Sumber pembiayaan yang berasal dari dunia usaha terdiri dari usaha negara, swasta dan koperasi, baik yang berupa investasi langsung maupun tabungan masyarakat serta kredit perbankan terutama diarahkan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dan yang bersifat cepat menghasilkan.

Guna lebih meningkatkan peranserta dunia usaha dalam melaksanakan investasi-investasi produktif, maka bersamaan dengan itu perlu ditingkatkan usaha penciptaan iklim usaha yang merangsang dan mendorong peranserta dunia usaha tersebut termasuk yang dengan ataupun tanpa fasilitas.

Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang merangsang ini dilengkapi pula dengan upaya-upaya deregulasi dan debirokratisasi serta tersedianya informasi mengenai peluang investasi dan peluang usaha dalam bentuk profil daerah, profil investasi dan profil proyek serta pencadangan areal/lahan untuk wilayah-wilayah (zona) industri, termasuk zona pengolahan ekspor (export processing zone).

Dalam pada itu penggalakan investasi melalui promosi juga senantiasa ditingkatkan guna memanfaatkan dengan sebaik-baiknya situasi dan peluang internasional pada waktu yang tepat.

Demikian pula perhatian yang terus-menerus dilakukan terhadap peningkatan pembiayaan usaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal serta petani dan nelayan, melalui peningkatan pelayanan kredit perbankan baik jumlah, mutu pelayanan maupun kelembagaannya.

b) Sumber Pembiayaan yang Berasal dari Swadaya Masyarakat.

Usaha meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah merupakan suatu keharusan; untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan dan terwujudnya kreativitas dan oto-

aktivitas di kalangan masyarakat.

Dalam rangka itu semua, maka perlu peningkatan sumber dana dari masyarakat. Dengan demikian peranserta masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat terwujud, khususnya dengan lebih mendayagunakan institusi keuangan/lembaga perkreditan di Daerah, seperti Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.

2) Luar Negeri.

Sumber-sumber ini dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) yang diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi serta tidak akan membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional dan tidak akan menghambat perkembangan perusahaan nasional. Untuk ini perlu terus dikembangkan iklim investasi yang menggairahkan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian berusaha, kelancaran pelayanan serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Dalam pada itu terhadap bantuan luar negeri, baik dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah, kepada organisasi non pemerintah di Jawa Tengah perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan yang sebaik-baiknya.

BAB IV

PENUTUP

A. PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang setiap 5 tahun sekali akan disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang.

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah (1989/1990 - 1993/1994) dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah merupakan tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 tahun pertama, diharapkan dapat merampungkan pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Jangka Panjang Pertama dan dapat memantapkan landasan yang kokoh kuat guna memasuki tahapan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua. Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan (Program-program) Tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya, dengan tetap memperhatikan kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan di berbagai bidang.

Dalam meningkatkan tanggungjawab keuangan negara, seluruh aparat pengawasan yang ada wajib meningkatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

B. PERSYARATAN

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada akhirnya tergantung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara baik aparat Pemerintah Pusat maupun Daerah dan seluruh rakyat Jawa Tengah, dengan meningkatkan kua-